

## CATATAN MERAH ATAS APBD NTB TAHUN 2020

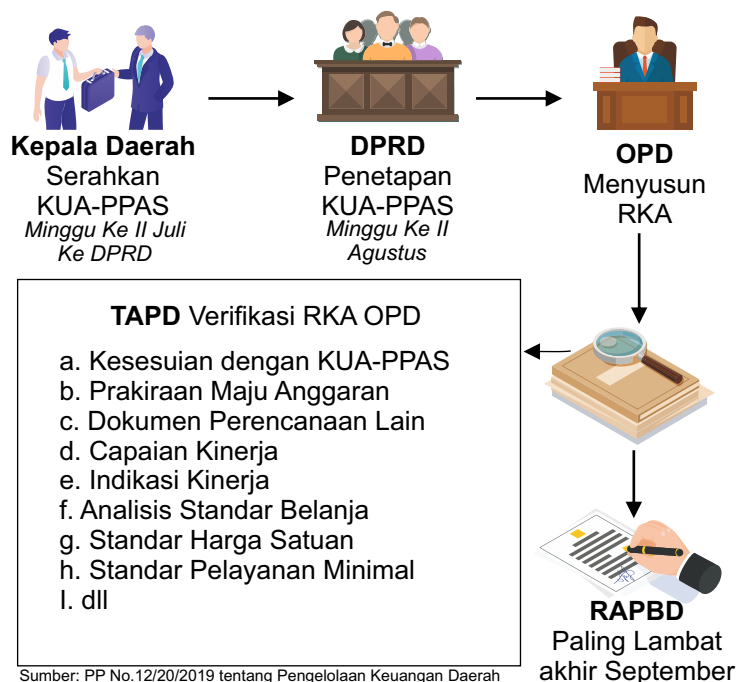
### A. PROSES PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan RAPBD NTB Tahun 2020 dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Pembahasan dilakukan hanya dalam waktu dua minggu. Pembahasan yang sangat singkat ini berakibat pada pengabaian prinsip-prinsip penyusunan APBD, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020, yaitu tepat waktu, transparan, partisipatif, dan tertib. Sangat jelas DPRD NTB periode 2014-2019 mengejar target untuk bisa membahas APBD 2020, pun Pemprov NTB. Kedua pihak ini saling diuntungkan secara politik pada situasi ini. Namun dengan mengorbankan hak-hak masyarakat luas.

Selama proses pembahasan, masyarakat NTB tidak mendapatkan akses terhadap informasi rancangan APBD, termasuk dokumen KUA-PPAS. Sehingga partisipasi masyarakat dalam proses ini tidak ada sama sekali. Terkait ini, masyarakat telah mengajukan keberatan atas buruknya layanan informasi publik kepada Gubernur NTB, namun hingga saat ini belum ada tanggapan apa pun.

Pembahasan dalam waktu singkat juga berpengaruh terhadap kualitas output dan hasil pembahasan RAPBD. Juga sangat rawan dengan munculnya perubahan nominal anggaran, baik disengaja atau tidak disengaja. Data-data dalam Nota Keuangan yang disampaikan Gubernur NTB ditemukan tidak sinkron dengan data dalam KUA-PPAS yang telah disepakati. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan angka Belanja Langsung di PPAS Rp2,212 triliun lebih sementara di Nota Keuangan dan RAPBD Rp2,243 triliun lebih. Kemudian Belanja Tidak Langsung di KUA-PPAS itu Rp3,474 triliun lebih, tapi berubah menjadi Rp3,443 triliun lebih. Di samping itu, banyak ditemukan kebijakan anggaran yang terindikasi pemborosan, tidak memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

#### Alur Penyusunan RAPBD



Sumber: PP No.12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara prosedur dan waktu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA-PPAS disampaikan oleh Kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak paling lambat minggu kedua Agustus. Sehingga terdapat ruang kesempatan yang cukup untuk membahas rancangan KUA-PPAS oleh DPRD NTB. Namun faktanya, penyampaian hingga penetapan rancangan KUA-PPAS Tahun 2020 hanya berlangsung 2 hari. Dokumen rancangan KUA-PPAS disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2019. Lalu pada tanggal 13 Agustus 2019, Banggar DPRD NTB membahasnya dalam waktu satu jam, untuk selanjutnya disepakati pada malam hari, pada tanggal yang sama. KUA-PPAS yang disepakati ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh OPD.

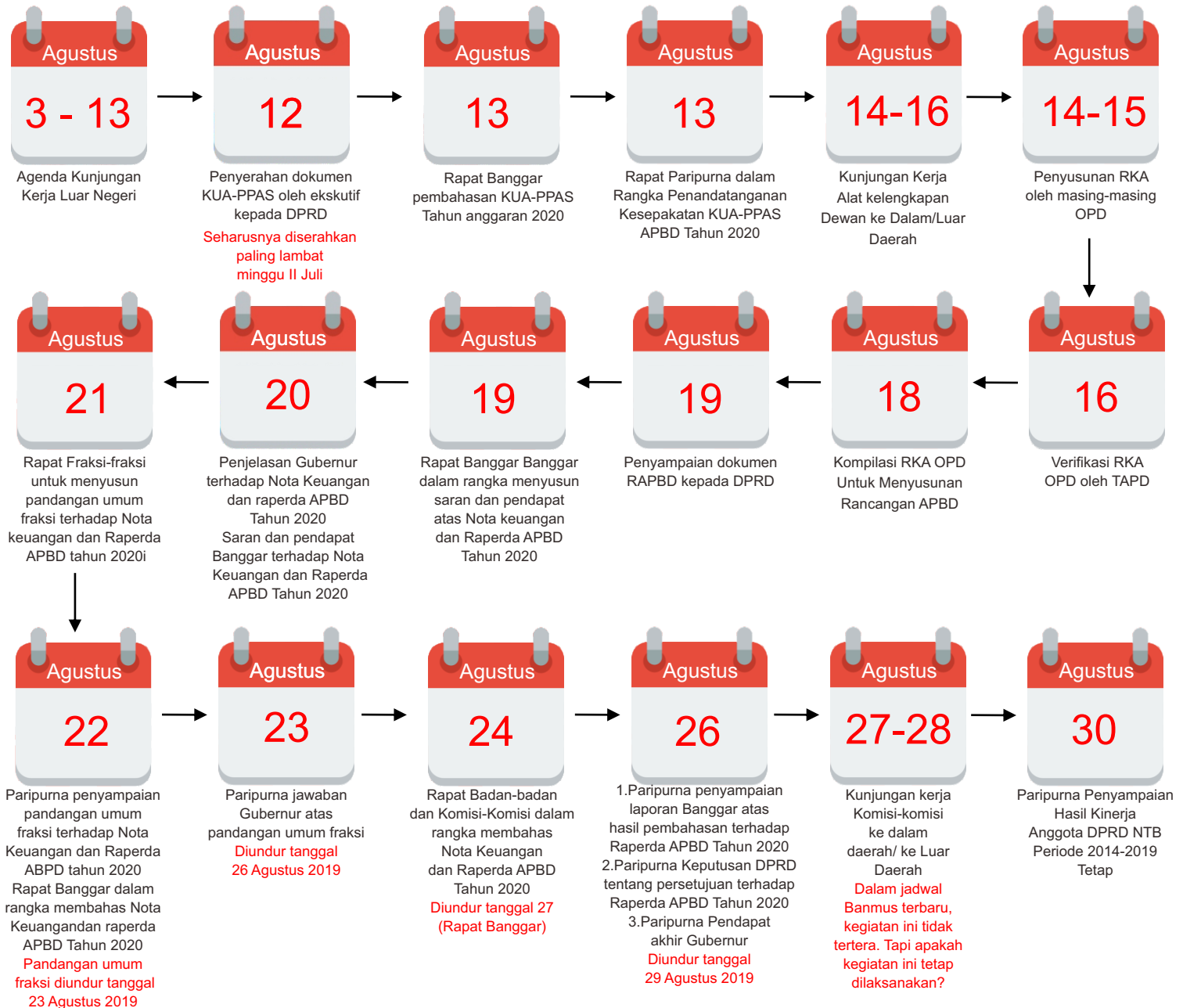
Akan tetapi RKA yang disusun OPD kurang dapat dipercaya karena hanya disusun, dibahas/diverifikasi dalam waktu 5 hari saja. Sulit dibayangkan bagaimana masing-masing OPD harus bekerja keras menyusun RKA sesuai dengan standar regulasi, dan bagaimana padatnya kerja TAPD memverifikasi RKA 34 OPD, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 24 Dinas Daerah, dan 7 Badan Daerah. Sebab penyusunan RKA harus melalui alur yang cukup panjang untuk menghasilkan dokumen yang kredibel sebagai dokumen perencanaan.

Sementara itu, RKA yang telah disusun disampaikan oleh OPD kepada TAPD untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: (a) KUA dan PPAS, (b) prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, (c) dokumen perencanaan lain, (d) capaian kinerja, (e) indikator kinerja, (f) analisis standar belanja, (g) standar harga satuan, (h) perencanaan kebutuhan BMD, (i) Standar Pelayanan Minimal, (j) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan (k) program dan kegiatan antar RKA SKPD. Terbatasnya durasi waktu verifikasi oleh TAPD berdampak pada buruknya perencanaan anggaran SKPD yang diindikasikan dengan banyak pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat untuk kepentingan umum.

Proses pembahasan RAPBD Tahun 2020 oleh DPRD NTB diindikasikan dilakukan tidak tertib. Guna memuluskan pembahasan RAPBD Tahun 2020 dapat selesai sesuai target, Banmus DPRD melakukan perubahan jadwal sidang. Bahkan Banggar diagendakan melakukan rapat pembahasan Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun 2020 lebih awal sehari sebelum Gubernur NTB menyampaikan penjelasan atas Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun 2020.

Jika ditarik ke belakang, sebab-musabab terbatasnya waktu pembahasan ini adalah agenda kunjungan kerja DPRD NTB yang sangat padat pada bulan yang sama. Kunjungan kerja dilakukan ke luar negeri pada dua minggu pertama Agustus 2019 dan disela-sela masa sidang pembahasan APBD. Kunjungan kerja ini menjadi perhatian serius masyarakat NTB karena melukai rasa keadilan masyarakat dan buruknya akuntabilitas public atas kunjungan kerja yang selama ini mereka lakukan. Meskipun demikian, mereka ngotot untuk terus melakukan pembahasan tanpa menghiraukan penolakan dan aspirasi masyarakat.

## Agenda "Padat" Penyusunan dan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh DPRD NTB dan Pemprov NTB



Sumber: Jadwal Sidang DPRD NTB Berbagai Sumber

## B. SUBSTANSI KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

### 1) PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang disusun pemerintah provinsi dan disetujui oleh DPRD NTB diproyeksikan sangat pesimis. Perkiraan pendapatan daerah kurang terukur secara rasional dan tidak menunjukkan target kinerja yang serius dalam mengumpulkan dana pembangunan daerah yang sesuai

dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan potensi riil, terutama proyeksi penerimaan retribusi daerah dan penerimaan laba dari investasi daerah. Retribusi daerah turun signifikan (-25%) dari target pada APBD perubahan 2019 yang mencapai Rp 26,3 miliar. Rendahnya proyeksi penerimaan PAD mengindikasikan belum adanya komitmen pemda untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

### Tren Pertumbuhan APBD Provinsi NTB

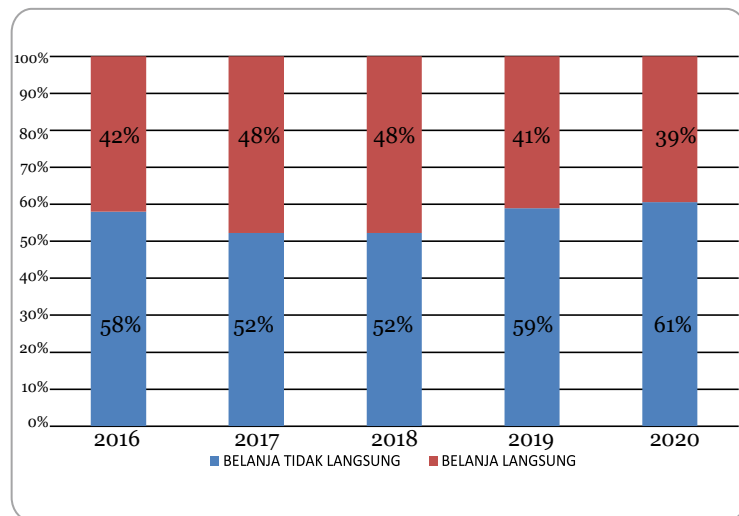
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	-1%	18%	8%	7%	10%
Retribusi Daerah	22%	-23%	-8%	24%	-25%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15%	125%	-63%	-9%	-1%
Lain-lain PAD yang Sah	-7%	25%	-2%	-11%	1%
<b>% Pertumbuhan Total PAD</b>	<b>-1%</b>	<b>24%</b>	<b>-1%</b>	<b>3%</b>	<b>8%</b>

Sumber: APBD NTB, diolah

## 2) BELANJA DAERAH

Secara umum, kebijakan belanja daerah Provinsi NTB Tahun 2020 kurang meyakinkan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan public dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Alokasi Belanja Langsung berkontraksi di bawah 40%, sementara alokasi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Belanja tidak langsung provinsi NTB tahun 2020 sebagian besar tersedot untuk membiayai earmarked expenditure, seperti gaji dan tunjangan (46%) dan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota (22%). Selain itu, nyatanya anggaran belanja hibah juga cukup besar, sekitar 31% dari total anggaran belanja tidak langsung.

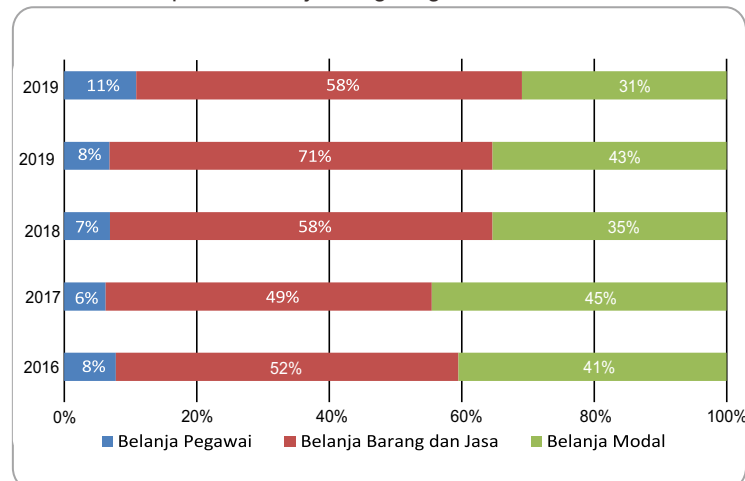
Grafik. Komposisi Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020



Sumber: APBD NTB Tahun 2020, diolah.

Komposisi belanja langsung pun jauh dari postur ideal dan tidak sinkron dengan arah prioritas pembangunan daerah tahun 2020, yaitu NTB Tangguh dan Mantap. Anggaran Belanja Program lebih banyak tersedot (69,1%) untuk honor dan belanja barang yang bersifat habis pakai, bernilai ekonomis jangka pendek serta tidak menambah asset daerah. Sebaliknya, belanja modal hanya dialokasikan sebesar 30,9% dari total belanja pembangunan. Padahal, belanja modal dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pemantapan infrastruktur dasar, dan dapat menambah nilai asset daerah.

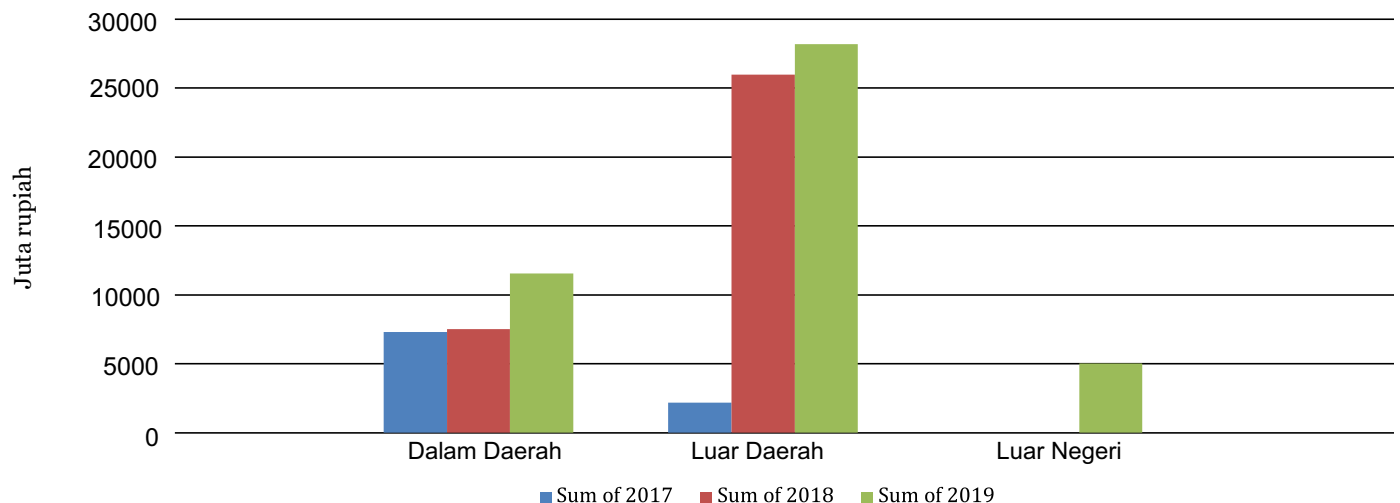
Grafik. Komposisi Belanja Langsung Provinsi NTB Tahun 2020



Sumber: APBD NTB Tahun 2020, diolah

Beberapa catatan lain pada Belanja Daerah tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Belanja subsidi senilai Rp 1,43 miliar berpotensi tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi pada dasarnya dimaksudkan agar harga jual produk (barang/jasa yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak) yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan eksekutif kepada DPRD NTB menyebutkan, subsidi akan diberikan kepada BRT DAMRI sebesar Rp 804,5 juta dan subsidi BBM Kapal Cepat jurusan Kayangan-Badas dan jurusan Moyo-Medang sebesar Rp 633,5 juta. Pemberian subsidi BBM ini bertujuan untuk mempermudah akses wisatawan berlibur ke objek wisata di Pulau Moyo. Logika ekonomi pemprov NTB dapat dipahami, bahwa pertumbuhan sector pariwisata melalui kebijakan ini akan dapat dinikmati oleh penduduk Moyo secara tidak langsung. Sementara rute yang akan dilayani BRT DAMRI tidak jelas. Tarif perjalanan menggunakan DAMRI sejauh ini juga cukup terjangkau. Namun jika tidak berhati-hati, akan menjadi temuan sebagaimana kebijakan subsidi operasional penerbangan udara rute Lombok-Bima beberapa tahun lalu. Sebab, hingga saat ini belum ada kejelasan ada tidaknya audit kepada perusahaan penerima subsidi. Berdasarkan Permendagri 33/2019, lembaga/perusahaan penerima harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh akuntan public sebelum belanja subsidi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- Belanja pegawai pada Belanja Langsung berpotensi terjadinya pemborosan anggaran daerah. Alokasinya pada tahun 2020 diproyeksi meningkat signifikan hingga 22,18% dari tahun 2019. Di sisi lain, proyeksi belanja modal turun 2,61%. Salah satu yang menjadi polemik adalah pos anggaran honor staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur yang terlampaui gemuk. Pada APBD 2019, anggaran untuk stafsus mencapai Rp 2,1 miliar. Padahal jelas, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program. Permendagri 33/2019 membatasi pemberian honorarium dan harus mempertimbangkan peran dan kontribusi nyata-nya terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- Anggaran kunjungan kerja DPRD NTB pada APBD 2020 diproyeksikan sebesar Rp 29 miliar. Belum termasuk anggaran perjalanan dinas dalam/luar daerah pada program lain. Dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar berupa perjalanan dinas luar daerah. Anggaran perjalanan dinas DPRD ini menjadi masalah karena buruknya akuntabilitas public atas aktivitas tersebut, dan tidak sensitive dengan persoalan masyarakat di daerah serta tidak relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- Pada awal Agustus lalu, secara berjamaah anggota DPRD NTB periode 2014-2019 menjelang berakhir masa jabatannya, melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan tujuan negara-negara Eropa dengan total anggaran 3,5 miliar rupiah. Masyarakat melakukan penolakan keras karena dinilai tidak sensitive dengan kondisi korban bencana gempa yang belum pulih dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, pada APBD 2020 anggaran kunker ke luar negeri dianggarkan lagi sebesar Rp 3 miliar.



Sumber: Dokumen Pergub APBD Perubahan 2017-2018 dan APBD 2019

- Anggaran Rp 40 miliar untuk beasiswa pendidikan tinggi tidak sesuai dengan prioritas masalah dan kewenangan provinsi NTB. Tercatat sebanyak 32.335 anak usia 16-18 tahun di NTB tidak dapat mengakses pendidikan menengah. Pemerintah NTB belum punya terobosan yang jelas untuk menyelesaikan persoalan ini. Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Sehingga akan lebih baik jika anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan akses dan infrastruktur pendidikan menengah, sesuai dengan target kinerja RPJMD, yaitu peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan IPM NTB yang menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU). Sementara anggaran untuk bantuan pendidikan tinggi tetap menggunakan dana non-APBD,

sebagaimana komitmen awal Gubernur NTB.

- Terdapat anggaran pengadaan mobil jabatan senilai Rp 2 miliar dan mobil dinas Rp 4 miliar pada Sekretariat Daerah agar dibatalkan karena tidak sesuai dengan prioritas daerah. Sebaiknya anggaran ini dialokasikan untuk membiayai program prioritas daerah, seperti rehab-rekon dan pemulihan ekonomi pasca gempa.
- Komitmen pemerintah provinsi NTB terhadap penanggulangan bencana masih rendah. Padahal, wilayah NTB merupakan salah satu jalur *ring of fire* yang memiliki tingkat risiko dan kerentanan bencana sangat tinggi. Anggaran program mitigasi bencana, rehabilitasi-rekonstruksi pasca gempa dan penanganan korban bencana masih di bawah 1% dari APBD. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana mewajibkan pembiayaan program penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebesar 1%.

## Anggaran Program Penanggulangan Bencana Tahun 2020

SKPD	Program	Anggaran(Rp)
DPU	Program Pengendalian Banjir	12.265.589.699
Dinas Perkim	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	200.000.000
BPBD	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.800.000.000
	Program Rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan Penanggulangan Bencana	8.200.000.000
	Program Jaminan Sosial	1.559.879.930
DLHK	Program Perlindungan Hutan, Konservasi SDA dan Ekosistem	17.045.933.659
	Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial	5.145.570.495
Dinas ESDM	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	262.290.200
Dislutkan	Program Pengelolaan Konsevasi Laut dan Perairan	948.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>47.427.263.983</b>
<b>% terhadap APBD</b>		<b>0,8%</b>

Sumber: APBD NTB Tahun 2020, diolah

FITRA NTB adalah sebuah perkumpulan yang bersifat sukarela dan tidak mencari keuntungan. FITRA NTB didirikan di Kota Mataram pada Hari Sabtu, tanggal 26 Mei 2012 oleh sejumlah aktivis dari beberapa organisasi di Mataram yang peduli dengan agenda mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas anggaran publik. Pada pertemuan Nasional FITRA III November 2013, di Jakarta, FITRA NTB diterima sebagai anggota FITRA. **VISI** : Mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran. **POSKO**: Jl. Pagesangan Indah XV No. 4, Pagesangan Kota Mataram, Lombok 83127. (Contact person : Ramli Ernanda – Sekretaris Jenderal FITRANTB)